

Polda Jateng Ajukan Pencekalan Salim

SEKAYU — Kepolisian Daerah (Polda) mengajukan permohonan cegah tangkal (cekal) terhadap Bupati Rembang Moch Salim kepada Kantor Imigrasi. Salim telah dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) pada 2006-2007. Berkas pemeriksaan Salim telah dinyatakan lengkap.

Pengajuan itu dilakukan untuk memperlancar proses hukum atas orang nomor satu di Rembang itu. "Pencekalan kami lakukan. Saat masih proses pengajuan ke Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM," kata Kepala Polda Jateng, Irjen Pol Dwi Priyatno di Hotel Crowne Plaza Semarang, Kamis (28/11).

Dwi juga menyatakan, penyidik Polda Jateng sampai saat ini belum bisa menahan Salim. Penyidik masih menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kan (pengajuan penahanan) sudah masuk Setneg dari tanggal 1 November kemarin, kami tinggal tunggu saja," lanjut jenderal polisi berpangkat bintang dua itu.

Sesuai aturan, sambung dia, Presiden mempunyai waktu 30 hari untuk menjawab surat tersebut. Apabila dalam kurun waktu tersebut Presiden tidak melayangkan surat balasan, maka pihaknya dapat melakukan upaya penahanan paksa.

"Masih ada waktu sampai akhir November ini, kami masih menunggu surat masuk," tandasnya.

Diakuinya, Polda sebenarnya ingin segera merampungkan kasus tersebut dengan melimpahkannya ke Kejati untuk segera disusun dakwaan. Selanjutnya kasus ditingkatkan ke penuntutan. "Tapi, pelimpahan tahap dua dapat segera dilakukan, kami akan koordinasikan hal ini dengan Kejaksaan," akunya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Babul Khoir sampai saat ini belum dapat memproses berkas penyidikan Salim lantaran penyidik Polda belum menyerahkan barang bukti berikut tersangka.

"Kami masih menunggu pelimpahan dari Polda, baru dapat kami tingkatkan ke penuntutan dan disusun dakwaannya," ujarnya.

PT RBSJ merupakan BUMD milik Pemkab Rembang yang mengelola beberapa unit usaha. Di antaranya adalah, unit industri, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata, termasuk pembukaan unit SPBU.

Besar dana yang digelontorkan ke PT RBSJ sebesar Rp 35 miliar. Berdasarkan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, ditemukan penyimpangan penggunaan uang negara pada APBD Kabupaten Rembang 2006-2007 sebesar Rp 5,5 miliar. (bud/ton/ce1)

